

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahan maupun dalam upaya meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum melalui penyediaan sarana dan prasarana umum. Setiap pemungutan pajak atau pengenaan pajak yang ada membawa tujuan dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum, jadi Negara selaku pemungut pajak membawa konsekuensi bahwa Negara mutlak harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.(Nita Wahyuni, dkk,2020)

Pajak mempunyai peran besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak dalam APBN semakin meningkat tiap tahun. Dengan begitu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. (Rahmadani, 2018).

Pajak erat hubungannya dengan pembangunan. Hampir seluruh negara yang ada, baik negara maju maupun negara berkembang, menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, termasuk negara Indonesia. Namun terdapat permasalahan besar dalam pengumpulan penerimaan pajak, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Menurut (Darussalam et al., 2019) [1] rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax to GDP ratio di Indonesia hanya berada pada kisaran 11 % selama lima tahun terakhir atau lebih rendah dari pada rata-rata dunia yang sebesar 16%. Ini disebabkan rendahnya kepatuhan pajak, kebocoran pajak, besarnya *shadow economy*, kurang elastisnya penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur penerimaan yang tidak seimbang dan sebagainya.(Nita Wahyuni, dkk, 2020)

Kemajuan yang pesat, khususnya dibidang ekonomi telah menjadikan Kota Malang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur. Sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah untuk digunakan guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dalam pengelolaannya di Kota Malang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2010 (Tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah nomer 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah).

Pemerintah tiap tahunnya akan terus meningkatkan target penerimaan pajak. Oleh karenanya, berbagai cara akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, diantaranya adalah melakukan perbaikan sistem dari manual ke elektronik, penyederhanaan penghitungan, dan lain sebagainya.

Menurut (Pujiani, 2012) Sistem pelayanan administrasi pajak yang semula manual dinilai masih memiliki banyak kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya Wajib Pajak yang memiliki transaksi cukup besar dalam pelaporan SPT diharuskan melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup banyak kepada Kantor Pelayanan Pajak, sementara itu proses perekaman data membutuhkan waktu yang lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan bahkan terlambat, sehingga dapat menimbulkan sanksi denda akibat keterlambatan pelaporan tersebut dan kelemahan lain pada sistem manual yaitu pada kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data oleh fiskus. Kelemahan sistem pelayanan administrasi perpajakan manual mendorong DJP untuk membuat inovasi yaitu merancang sistem informasi elektronik bagi Wajib Pajak.

Inovasi system elektronik bagi wajib pajak dirancang agar lebih mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem elektronik perpajakan yang menjadi bentuk modernisasi perpajakan tersebut diantaranya e-SPT, e-Registration dan e-Filing. Dengan penerapan yang baik dari sistem elektronik perpajakan tersebut akan menunjukkan kualitas pelayanan administrasi dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, modernisasi sistem perpajakan yang direncanakan secara rinci dan menggunakan strategi yang baik akan mempengaruhi besarnya pendapatan pajak yang akan diterima nantinya.

Sekolah Katolik Marsudi Siwi Malang merupakan sekolah katolik yang ada di kota malang, peneliti melakukan penelitian di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Malang karena peneliti ingin mengetahui karyawan/wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan diatas, serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-SPT, E-Registration dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (studi pada wajib pajak orang pribadi Di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang 2022)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan *E-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang?
3. Bagaimanakah pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimanakah pengaruh penerapan *E-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang.
2. Mengetahuai penerapan *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang .
3. Mengetahui penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sekolah Katolik Marsudi Siwi Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan ada tidaknya hubungan penerapan E-SPT, E-Registration, dan E-Filling Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dan dapat meningkatkan penerapan E-SPT, E-Registration, dan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.